



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

SEKRETARIAT DAERAH

*Alamat Jalan Merdeka Nomor 64 Tilamuta Kabupaten Boalemo Kode
Pos 96263 website www.boalemokab.go.id*

TEKNIK PENYUSUNAN, PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 36

TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat rahmat dan hidayahNya kepada kami sehingga Kajian teknis ini dapat tersusun dengan selesai. Sholawat serta salam tercurah kepada Baginda Muhammada SAW juga kepada sahabat dan keluarganya hingga Yaumil akhir.

Kajian teknis ini bertujuan untuk memberikan analisis dilakukan penyesuaian Struktur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyusunan kajian ini sebagai pemenuhan dokumen kelembagaan penyesuaian struktur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami menyadari penyusunan kajian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dimasa mendatang. Semoga kajian dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP



ROMIN SAHIDI, S.Mn. MM

KAJIAN TEKNIS

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi di Indonesia menuntut adanya penyederhanaan struktur organisasi, termasuk pada dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 mendorong DPMPTSP di daerah untuk melakukan transformasi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan perizinan, serta menyesuaikan proses perizinan berbasis elektronik sesuai amanat UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.

Perubahan struktur ini memuat DPMPTSP menjadi instansi yang lebih mandiri, mengurangi rantai birokrasi yang panjang, memperkuat konsistensi pelayanan publik serta peran strategis DPMPTSP dalam pemacu pertumbuhan ekonomi daerah. Transformasi ini juga menuntut ASN di bidang perizinan dan penanaman modal untuk lebih profesional, adaptif terhadap perubahan, dan berbasis pada sistem kerja yang terukur.

1.2 Tujuan kajian

- a. Memberikan dasar pertimbangan perubahan struktur DPMPTSP.
- b. Menjelaskan urgensi perubahan struktur DPMPTSP.
- c. Memberikan rekomendasi sebagai landasan dalam Penetapan kelas penyusunan regulasi perubahan struktur DPMPTSP.

II. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4);
 4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1.3. Penyesuaian Struktur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boalemo dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan struktur Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Simplifikasi terhadap struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menciptakan birokrasi yang dinamis, serta mendorong investasi dan kesejahteraan daerah. Hal ini pula selaras dengan fokus utama dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 yaitu :

- a. penataan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;

- b. pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu; dan
- c. peningkatan efektifitas pelayanan publik.

Selain itu, yang mendorong dilakukannya penyesuaian struktur yaitu tersedianya pejabat fungsional Penata Perizinan (1 orang) dan Penata Kelola Penanaman modal (9 orang) yang telah lulus uji kompetensi namun belum didukung oleh struktur organisasi yang sesuai sehingga sangat mempengaruhi sistem kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dampak yang dihasilkan dari penyesuaian struktur ini adalah :

- a. Penyederhanaan Proses:

Struktur baru dirancang untuk memangkas alur birokrasi yang panjang. Proses perizinan menjadi lebih terpusat dan terkoordinasi. Hal ini secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

- b. Peningkatan Kapasitas Pelayanan:

Struktur yang baru memungkinkan adanya spesialisasi fungsi menangani konsultasi investasi atau pengaduan, yang memungkinkan pelayanan yang lebih fokus dan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa dengan struktur yang tepat, DPMPTS dapat berfungsi lebih dari sekadar loket perizinan, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra strategis bagi investor

- c. Adaptasi terhadap Teknologi:

Perubahan struktur organisasi disesuaikan agar mampu mengelola dan mengoperasikan sistem digital ini secara efektif sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini menekankan bahwa perubahan struktur adalah langkah krusial untuk mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik

Dengan dilakukannya penyesuaian struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tugas dan fungsinya akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penyesuaian struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021. Secara nomenklatur dinas tidak berubah sehingga penyesuaian struktur ini perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Boalemo.